



**PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT TNI DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER**

SKRIPSI

M. ZIDNI MAULANA

111 0611 071

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2015



**PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT TNI DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

M. ZIDNI MAULANA

111 0611 071

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M. Zidni Maulana

NRP : 1110611071

Tanggal : 15 Juni 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juli 2015

Yang Menyatakan



(M. Zidni Maulana)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zidni Maulana
NRP : 1110611071
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT TNI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM DISIPLIN MILITER**

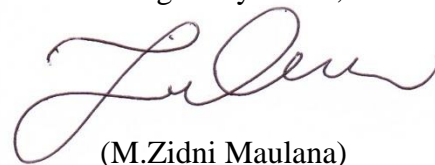
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2015

Yang menyatakan,


(M.Zidni Maulana)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

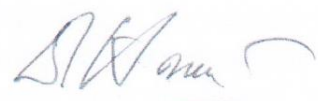
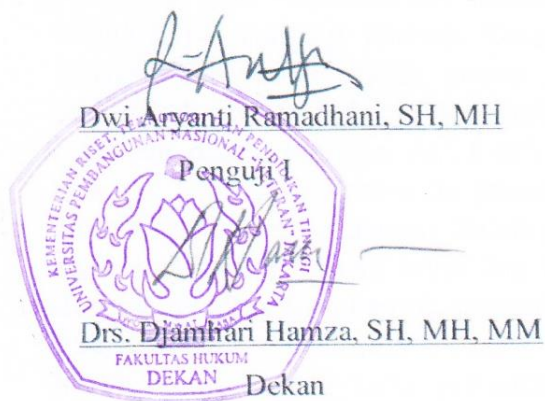
Nama : M. Zidni Maulana
NRP : 111.0611.071
Program Studi : Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Penegakkan Disiplin Prajurit TNI Dalam Pembaharuan
Hukum Disiplin Militer

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

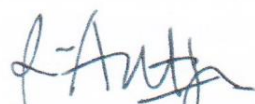


Ahmad Makbul, S.Ag., SH, MH

Ketua Penguji



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Penguji II (Pembimbing)



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 11 Juli 2015

PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER

M. Zidni Maulana

Abstrak

Peraturan Hukum Disiplin Militer menurut UU No.26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI bahwa pertimbangan yang mendasari terbitnya UU No.26/1997 menunjukkan bahwa TNI pada era sebelum reformasi masih disebut sebagai ABRI. Sedangkan fungsinya tidak hanya dipandang sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan keamanan namun dipandang juga sebagai kekuatan sosial politik. Pandangan inilah yang menjadi alasan TNI di era orde baru berperan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa. Peran TNI ini di zaman orde baru dikenal dengan sebutan "Dwi Fungsi ABRI". Di zaman orde baru, Polri menjadi salah satu unsur kekuatan ABRI, dan langsung berada dibawah komando Panglima ABRI. Kebijakan negara yang menetapkan TNI sebagai kekuatan sosial politik, dan sebagai kekuatan keamanan kini sudah tidak berlaku lagi, karena TNI tak lagi dipandang sebagai kekuatan sosial politik, dan Polri pun kini sudah tidak lagi berada dibawah komando Panglima TNI. Pembaharuan Hukum Disiplin Militer Setelah Disyahrkannya UU No.25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terungkap dari penegasan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Salah satu indikator pembaharuan hukum militer di Indonesia adalah bahwa tugas dan fungsi TNI dibatasi hanya sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kata Kunci:Hukum, Disiplin, Prajurit

PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER

M. Zidni Maulana

Abstract

Legal Regulation of Military Discipline according to Law No. 26 of 1997 on the Law of Discipline The Soldiers that considerations underlying the issuance of Law No. 26 of 1997 shows that the TNI in the era before the reform is still referred to as the Armed Forces. While the function is not only seen as a defense forces, security forces but is seen also as a social and political force. The view is the reason the military in the new order era very dominant role in the life of society, nation and state, and became one of the political forces that determine the direction of the nation. TNI's role in the new order, known as "dual function of the Armed Forces". In the new order, the police became one of the elements of the power of the armed forces, and directly under the command of the Commander of the Armed Forces. State policy that sets military as a social and political force, and as the security forces now no longer valid, because the military is no longer seen as the power of the social and political, and police were now no longer under the command of the military commander. Military Discipline Law Reform After the issuance of Law No. 25 of 2014 on the Law of Military Discipline of affirmation revealed military position as a major component of the national defense system that serves as a deterrent and executor any form of military threats and armed threats both from within and from outside the country to the rule , territorial integrity and safety of the nation and restoring the country's security conditions are disrupted by the security chaos. Thus, one of the indicators of military law reform in Indonesia is that the duties and functions of the military is restricted only as an antidote and executions any form of military threats and armed threats both from within and from abroad against the sovereignty, territorial integrity and safety of the nation and restoring the condition of the country's security were disrupted by the security chaos. In the military discipline of law reforms also occur affirmation soldiers positions in law enforcement military discipline that the military as citizens and army as soldiers.

Key Words :Law, Dicipline, Soldier

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas curahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Penegakkan Disiplin Prajurit TNI Dalam Pembaharuan Hukum Disiplin Militer”**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta.

Dengan tersusunnya Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setulus-tulusnya kepada Papa dan Mama tercinta yang dengan kesabarannya senantiasa memberi dukungan, dorongan dan doa yang tiada hentinya untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini. Kakak ku Tenny, Whenny, Indra, serta saudara-saudara yang sering memberi motivasi, doa, dan dukungan untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini. Cindy Amalia yang telah memberikan banyak inspirasi, doa, motivasi, membangunkan setiap hari, menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman yang banyak sekali memberikan inspirasi, semangat, dan segala bantuan BOOM.INC, Bondan E.P, Surya G.P, Rollandiaz, Rizky Yudha, Adrel M.J, Kevin Z, *STRUGGLECREW*, Fajar Dwi, Arya Zainal, Rifki Desi, Afriangga, Risum, Fanimz, Muthia, Rain, Rio Rahmawan, Sandi, Maya. Rekan-rekan dan para pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan berbagai kegiatan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Bekasi, 15 Juni 2015

M. Zidni Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	5
I.3 Ruang Lingkup	5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	7
I.6 Metode Penulisan	18
I.7 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM DISIPLIN MILITER DI INDONESIA	21
II.1 Pengertian Hukum Disiplin Militer	21
II.2 Hakikat, Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer	21
II.3 Ruang Lingkup Hukum Disiplin Prajurit TNI	25
BAB III KETENTUAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI DI INDONESIA	29
III.1 Produk Hukum Militer Hindia Belanda	29
III.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI	30
III.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer	44
BAB IV PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI	47
IV.1 Peraturan Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997	47
IV.2 Pembaharuan Hukum Disiplin Militer Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer	58
BAB V PENUTUP	70
V.1 Kesimpulan	70
V.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	